

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Astrid Meliani Basrani

NPP. 32.0338

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: astridmeliani1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The rise of community organization (Ormas) activities in local political dynamics, particularly during the Jakarta Regional Head Election (Pilkada), highlights the urgency of effective supervision to ensure political neutrality and uphold democratic quality. However, in practice, the role of supervision by the Jakarta Provincial Agency for National and Political Unity (Bakesbangpol) faces challenges such as limited human resources, suboptimal use of information technology, and weak cross-agency coordination. Purpose:* This study aims to examine the role of Bakesbangpol in supervising the political preferences of Ormas during the Jakarta Pilkada, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategic efforts to improve the effectiveness of the supervision process. **Method:** *This research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including semi-structured interviews, observation, documentation, and source triangulation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the role theory by Biddle & Thomas. Result:* The findings indicate that Bakesbangpol performs its supervisory function through persuasive and participatory approaches such as socialization and capacity building for Ormas. However, technical and coordination-related limitations remain. Meanwhile, Ormas are shown to have significant influence in shaping public opinion and voter preferences, particularly through identity-based mobilization. **Conclusion:** *To enhance the quality of supervision over Ormas activities, Bakesbangpol must strengthen institutional capacity, improve collaboration with relevant institutions such as the General Elections Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu), and develop digital systems to monitor Ormas activities in a more transparent and real-time manner.*

Keywords: *Community Organization, Bakesbangpol, Regional Election*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam dinamika politik lokal, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menunjukkan urgensi pengawasan yang efektif untuk menjamin netralitas serta menjaga kualitas demokrasi. Namun dalam praktiknya, peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bakesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik Ormas di Pilkada DKI Jakarta, mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan tersebut, serta merumuskan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, serta triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori peran dari Biddle & Thomas. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa Bakesbangpol menjalankan fungsi pengawasan secara persuasif dan partisipatif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada Ormas, namun terkendala pada aspek teknis dan koordinatif. Di sisi lain, Ormas terbukti memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan preferensi pemilih, terutama melalui pendekatan berbasis identitas sosial. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap aktivitas Ormas, Bakesbangpol perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu, serta mengembangkan sistem digital yang mampu memantau aktivitas Ormas secara real-time dan transparan.

Kata Kunci: Ormas, Bakesbangpol, Pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum strategis dalam demokrasi lokal yang rawan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dalam konteks DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang memiliki dinamika sosial-politik tinggi, peran Ormas tidak dapat diabaikan. Ormas sering kali menjadi aktor penting dalam membentuk opini publik serta mengarahkan preferensi politik masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh (Arniti, 2020), “Pengaruh organisasi kemasyarakatan dalam melakukan mobilisasi pemilih cukup signifikan, terutama pada konteks berbagai isu yang sensitif di lingkungan masyarakat”. Data dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 4.258 Ormas yang aktif, dengan persebaran tertinggi di wilayah Jakarta Timur sebanyak 130 Ormas. Hal ini mempertegas bahwa dinamika Ormas sangat kuat, dan perlu dilakukan pengawasan yang menyeluruh agar aktivitas mereka tidak melampaui batas hukum dan etika demokrasi. Dalam hal ini, Bakesbangpol memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjamin stabilitas sosial-politik melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi terhadap aktivitas Ormas. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan oleh Bakesbangpol masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian dari (Pamungkas et al., 2024) menegaskan bahwa “Kedudukan lembaga pengawasan seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta untuk melakukan pencegahan konflik yang dapat hadir karena perbedaan kepentingan.”

Dalam dinamika ini, peran organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSOs) sebagai aktor non-negara yang mengadvokasi keadilan sosial dan reformasi politik turut memperkaya wacana pengawasan terhadap Ormas. Menurut (Rusfiana & Kurniasih, 2024), CSOs di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi publik, menumbuhkan akuntabilitas pemerintah, dan mengisi celah dalam proses reformasi kebijakan. Mereka menggunakan strategi advokasi seperti kampanye publik, mobilisasi akar rumput, dan dialog kebijakan untuk mempengaruhi arah kebijakan negara, termasuk dalam konteks pengawasan sosial terhadap aktivitas politik berbasis identitas. Studi tersebut juga menyoroti bahwa kolaborasi antara CSOs dan lembaga negara dapat menjadi model pengawasan yang lebih partisipatif dan adaptif, meskipun tetap diwarnai tantangan seperti represi politik dan keterbatasan hukum. Dalam konteks pengawasan Ormas oleh

Bakesbangpol, pelibatan CSOs sebagai mitra strategis dapat memperkuat fungsi preventif dan kuratif terhadap potensi politisasi Ormas yang melampaui batas konstitusional.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi contoh konkret bagaimana isu agama dan ras dimanfaatkan oleh Ormas dalam kampanye politik. Hal ini diperkuat oleh (Saputra & Mesra, 2024) yang menyatakan bahwa “Setiap ormas keagamaan menggunakan media sosial, ceramah keagamaan, dan berbagai aktivitas sosial untuk menciptakan opini publik positif terhadap calon yang didukung.” Fenomena ini selaras dengan temuan (Mietzner, 2012) yang menjelaskan bahwa stagnasi demokrasi di Indonesia tidak disebabkan oleh rendahnya dukungan masyarakat terhadap demokrasi, melainkan karena adanya kekuatan elite anti-reformasi yang justru memanfaatkan celah demokratisasi—termasuk melalui Ormas—untuk menggembosi reformasi politik demi kepentingan sempit. Dalam situasi seperti ini, Bakesbangpol dituntut untuk tidak hanya menjadi pengawas administratif, tetapi juga fasilitator komunikasi antara Ormas, masyarakat, dan lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Peran ini penting agar tercipta pengawasan yang lebih inklusif dan tidak represif. Seperti disampaikan oleh (Indah et al., 2024) “Bakesbangpol berfungsi untuk memberikan jaminan jika kegiatan ormas selalu taat pada hukum dan tidak menciptakan ketegangan sosial yang dapat mempengaruhi keamanan serta ketertiban umum.”

Kondisi ini semakin kompleks karena perluasan kebebasan sipil dan media pasca-reformasi ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok moderat, tetapi juga oleh aktor konservatif dan radikal untuk menyebarluaskan narasi intoleransi dan eksklusivisme agama. (Hamayotsu, 2013) mengungkapkan bahwa kemajuan media dan kebebasan informasi justru telah memberi ruang bagi aktor-aktor konservatif untuk memobilisasi dukungan politik melalui Ormas dan institusi negara, termasuk menyebarkan wacana diskriminatif yang mengancam pluralisme dan kebebasan beragama. Bakesbangpol, dalam hal ini, berada di tengah tekanan untuk menjaga netralitas dan mengendalikan ruang publik yang mulai rentan terhadap politisasi identitas. Di sisi lain, seperti dikemukakan (Lublin & Wright, 2013) sistem representasi politik yang inklusif memang penting dalam demokrasi multietnis. Namun jika tidak disertai pengawasan ketat terhadap konten mobilisasi, justru dapat memperkuat segmentasi sosial-politik yang tidak sehat, di mana Ormas berubah menjadi alat mobilisasi politik identitas yang eksklusif.

Berdasarkan situasi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana Bakesbangpol menjalankan fungsinya secara nyata di lapangan. Pengawasan terhadap Ormas bukan hanya soal legalitas administratif, tetapi juga mencakup dimensi etis dan sosial-politik, seperti menjaga netralitas lembaga, mencegah politisasi Ormas, serta membangun kesadaran demokratis di masyarakat. Seperti dijelaskan oleh (Buhungo et al., 2024), “Masalah yang dapat ditemukan yaitu adanya tuduhan jika beberapa organisasi masyarakat dekat dengan pemerintah serta partai politik memperoleh perlakuan yang berbeda dalam pengawasan.” Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga pengawas seperti Bakesbangpol masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai peran Bakesbangpol, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan menjadi penting dalam konteks penguatan kelembagaan dan demokrasi di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta menjadi perhatian penting seiring meningkatnya keterlibatan Ormas dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Jumlah Ormas yang mencapai lebih dari 4.000 organisasi menunjukkan potensi pengaruh yang signifikan dalam kontestasi politik lokal. Namun demikian, pengawasan terhadap aktivitas politik Ormas belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih seringnya isu SARA dimanfaatkan oleh sejumlah Ormas untuk membentuk opini publik menjelang Pilkada.

Akibatnya, potensi polarisasi sosial dan menurunnya kualitas demokrasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah daerah, khususnya Bakesbangpol selaku institusi pengawas.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah mengkaji peran Bakesbangpol, tetapi fokusnya lebih banyak pada aspek pembinaan atau peningkatan partisipasi politik masyarakat secara umum, bukan secara khusus menyoroti pengawasan terhadap preferensi politik Ormas dalam konteks Pilkada (Adnyanaesa & Utama, 2023; Ikhsan, 2023). Padahal, menurut (Supartinah, 2023), kedudukan Ormas dalam politik dan pemilu menjadi alat yang sangat efisien dalam memengaruhi opini publik, sehingga tanpa pengawasan yang ketat, Ormas berpotensi menyebarkan informasi bias bahkan melanggar etika demokrasi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah belum adanya regulasi teknis yang secara operasional mengatur pembatasan aktivitas politik Ormas menjelang Pilkada. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Pamungkas et al., 2024) yang menyebutkan bahwa lemahnya kerangka hukum teknis serta terbatasnya sumber daya di Bakesbangpol membuka ruang bagi berbagai penyimpangan. Dengan latar belakang ini, maka terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu pentingnya mengkaji secara spesifik peran Bakesbangpol dalam pengawasan preferensi politik Ormas dalam Pilkada di DKI Jakarta sebagai wilayah dengan dinamika sosial-politik yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memperkuat strategi pengawasan yang lebih adaptif dan demokratis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Nora et al., 2023) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Ormas dilakukan melalui pendekatan administratif dan evaluatif, namun menghadapi kendala pada aspek pendataan dan pelaporan kegiatan.

Sementara itu, (Elviora & Prathama, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam Penerimaan dan Pengawasan Ormas mengungkapkan bahwa meskipun Bakesbangpol telah berperan aktif dalam membina Ormas, tantangan seperti isu radikalisme dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Lies Kumara Dewi et al., 2024) meneliti Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Bakesbangpol di Provinsi Lampung dan menemukan bahwa pengawasan dilakukan baik terhadap Ormas yang terdaftar maupun tidak, melalui pendekatan silaturahmi dan kegiatan kebangsaan, namun pengawasan terhadap Ormas non-terdaftar masih belum efektif.

(Wibowo & Harefa, 2015) dalam artikelnya berjudul Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah menekankan bahwa meningkatnya jumlah Ormas yang bertindak di luar batas hukum menuntut pemerintah untuk memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan berbasis regulasi yang jelas.

(Rowa & Aser, 2019) menyoroti peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung sistem pemerintahan desa melalui studi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan RT dan RW di Kabupaten Bogor. Mereka menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat simbolik dan kurang efektif karena lemahnya mekanisme pengawasan dan pemberdayaan.

(Irfan Uluputty, 2015) dalam penelitiannya mengenai Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum menjelaskan bahwa penguatan peran pemerintah provinsi dalam urusan pemerintahan umum, termasuk pengawasan terhadap dinamika sosial politik, harus didasarkan pada strategi yang memperkuat koordinasi dan ketertiban daerah.

Selain itu, (Lami, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Ngada mengungkapkan bahwa Bakesbangpol telah melaksanakan

perannya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan katalisator, dengan menjalankan program-program kerja melalui kegiatan sosialisasi politik, verifikasi bantuan hibah partai politik, serta inovasi partisipatif yang mendorong masyarakat muda secara mandiri terlibat dalam partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori peran, di mana peran kelembagaan difokuskan pada penguatan partisipasi politik masyarakat sesuai dengan aturan dan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah.

Penelitian oleh (Mietzner, 2012) dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and the Resilience of Oligarchy” menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melewati masa transisi demokrasi pasca-Orde Baru, proses konsolidasi demokrasi mengalami stagnasi karena kekuatan elit-elit anti-reformasi. Studi ini menyoroti bagaimana lembaga-lembaga negara, termasuk yang terkait dengan pengawasan terhadap aktor-aktor sosial-politik seperti Ormas, kerap disusupi oleh kepentingan oligarkis yang justru melemahkan akuntabilitas demokratis.

Dalam penelitian (Lublin & Wright, 2013) yang berjudul “Engineering Inclusion: Assessing the Effects of Pro-Minority Representation Policies”, dibahas bagaimana mekanisme representasi minoritas etnis dalam sistem politik dapat memengaruhi pola partisipasi politik dan keterlibatan aktor sosial seperti Ormas. Penelitian ini relevan dalam konteks Indonesia karena memperlihatkan risiko munculnya segmentasi politik berbasis etnis dan agama ketika pengawasan terhadap aktivitas Ormas tidak dilakukan secara adil dan inklusif.

Sementara itu, (Hamayotsu, 2013) dalam artikelnya yang berjudul “The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance” mengungkapkan bahwa kebebasan media yang hadir setelah reformasi dimanfaatkan oleh kelompok Ormas konservatif dan radikal untuk menyebarkan narasi intoleransi. Penelitian ini menekankan bahwa pengawasan terhadap Ormas seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek ideologis dan implikasi sosial dari aktivitas yang dilakukan Ormas di ruang publik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Rusfiana & Kurniasih, 2024) dalam jurnal berjudul “The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia”. Studi ini menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan. Namun, tantangan seperti represi politik, hambatan regulatif, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan serius bagi efektivitas advokasi mereka. Penelitian ini relevan sebagai refleksi terhadap pentingnya sinergi antara lembaga negara seperti Bakesbangpol dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap Ormas secara konstruktif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menunjukkan adanya kebaruan ilmiah yang signifikan. Penelitian terdahulu umumnya membahas pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kerangka kelembagaan secara umum, seperti yang dilakukan oleh (Nora et al., 2023), (Elviora & Prathama, 2025), (Lies Kumara Dewi et al., 2024), yang lebih menekankan pada aspek administrasi, pembinaan dasar, dan kendala teknis seperti pelaporan atau pendataan Ormas.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam mengawasi kecenderungan preferensi politik Ormas menjelang pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kompleksitas sosial dan politik yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan

teori peran (Biddle & Thomas) dengan lima indikator (harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi), yang belum digunakan secara lengkap dalam penelitian terdahulu.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari sisi konteks dan metode, di mana peneliti mengangkat dinamika keterlibatan Ormas dalam ranah politik praktis dan memetakan strategi pengawasan yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif lintas lembaga. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif dalam menjawab tantangan pengawasan demokrasi lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi kebaruan secara konseptual dan praktis dalam kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik organisasi kemasyarakatan (Ormas) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, penghambat, dan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik organisasi kemasyarakatan (Ormas) pada Pilkada. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali fenomena secara utuh melalui interaksi langsung dengan informan serta analisis terhadap data yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada sembilan informan, yang terdiri dari unsur pemerintah (kepala Bakesbangpol dan staf pengawasan), ketua dan anggota Ormas, serta masyarakat umum yang memahami dinamika Ormas di wilayah DKI Jakarta.

Analisis data menggunakan model (Miles, Matthew.B; Huberman, 2002) yang terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengetahui bentuk peran Bakesbangpol berdasarkan indikator teori peran dari Biddle & Thomas, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat, dan sah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik organisasi kemasyarakatan (Ormas) selama Pilkada. Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. menggunakan teori peran dari Biddle & Thomas yang mencakup lima indikator teori peran, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.

3.1. Harapan

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengemban harapan besar dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam memastikan bahwa Ormas tidak terlibat dalam politik praktis selama tahapan Pilkada berlangsung. Harapan tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembinaan kepada Ormas, penyaluran informasi regulasi secara aktif, serta penyelenggaraan forum dialog untuk menjaga kondusivitas masyarakat.

Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, diketahui bahwa Ormas dipandang sebagai mitra strategis pemerintah yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, Bakesbangpol berharap peran Ormas difokuskan pada penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan pada kepentingan politik tertentu. Untuk itu, Bakesbangpol secara rutin mengeluarkan surat edaran tentang netralitas dan mengundang perwakilan Ormas dalam kegiatan sosialisasi politik damai.

Harapan ini juga datang dari masyarakat yang menginginkan suasana Pilkada berjalan damai dan tidak terprovokasi oleh aktivitas Ormas yang partisan. Secara umum, harapan tersebut mendorong Bakesbangpol untuk lebih aktif dalam melakukan pendekatan persuasif dan membangun relasi kolaboratif dengan Ormas agar fungsi sosialnya tetap terjaga.

3.2. Norma

Norma yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Mendagri dan edaran Gubernur DKI Jakarta. Norma ini secara tegas melarang Ormas terlibat dalam politik praktis, menyatakan bahwa Ormas harus bersifat independen, dan wajib melaporkan kegiatan secara berkala kepada Bakesbangpol.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi norma tersebut di tingkat Ormas belum berjalan maksimal. Berdasarkan wawancara dengan pegawai bidang Ormas, ditemukan bahwa masih banyak Ormas yang tidak melaporkan kegiatan atau bahkan tidak mengetahui secara utuh kewajiban administratif mereka. Sebagian besar Ormas hanya aktif menjelang momen-momen tertentu dan mengabaikan pelaporan rutin.

Bakesbangpol kemudian mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman Ormas terhadap norma hukum dengan cara sosialisasi regulasi dan pelatihan manajemen organisasi. Dalam pendekatannya, Bakesbangpol tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina yang mendorong Ormas agar dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.

3.3. Wujud Perilaku

Wujud perilaku Bakesbangpol sebagai pengawas terlihat dari berbagai kegiatan konkret yang dilaksanakan. Hal ini mencakup klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran, pemantauan langsung aktivitas Ormas, serta pelibatan dalam forum komunikasi dan edukasi kebangsaan. Seluruh tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan peran pengawasan secara aktif.

Dalam wawancara dengan salah satu staf teknis Bakesbangpol, dijelaskan bahwa ketika terdapat laporan dari masyarakat mengenai keterlibatan Ormas dalam dukungan politik terhadap calon tertentu, maka pihaknya segera melakukan klarifikasi dan pembinaan langsung di lapangan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar Ormas tidak merasa disudutkan dan tetap terbuka dalam berdialog.

Selain itu, Bakesbangpol juga mendorong partisipasi Ormas dalam kegiatan kebangsaan seperti pelatihan bela negara, penyuluhan hukum, serta kegiatan sosial lainnya. Kehadiran Ormas dalam kegiatan ini menunjukkan adanya perilaku positif yang selaras dengan fungsi sosial Ormas sebagai pilar masyarakat.

3.4. Penilaian Dan Sanksi

Penilaian terhadap Ormas dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, partisipasi dalam pembinaan, dan respons terhadap klarifikasi pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran ringan, sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis. Namun, untuk pelanggaran berat seperti deklarasi dukungan politik oleh Ormas, maka Bakesbangpol memberikan rekomendasi pembekuan atau pelaporan ke penegak hukum.

Wawancara dengan Kepala Bidang Ormas menyebutkan bahwa proses evaluasi dilakukan secara bertahap dan berdasarkan dokumentasi. Umpan balik juga diberikan dalam bentuk evaluasi tertulis dan ajakan untuk memperbaiki kesalahan administratif. Hal ini dilakukan guna menanamkan kesadaran jangka panjang kepada Ormas akan pentingnya menjaga netralitas politik.

Sanksi yang diberikan tidak bersifat represif, tetapi edukatif. Bahkan dalam beberapa kasus, Bakesbangpol memberikan kesempatan kepada Ormas untuk mengikuti pelatihan ulang sebagai bentuk penilaian korektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembinaan yang mengedepankan pemulihan dan pemahaman, bukan penghukuman semata

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjelang pelaksanaan Pilkada. Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi netralitas politik, pembinaan melalui dialog antarormas, dan klarifikasi terhadap temuan pelanggaran.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Nora et al., 2023), yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Ormas dilakukan dengan pendekatan administratif dan evaluatif, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelaporan kegiatan dan monitoring secara berkala. Namun, berbeda dengan penelitian (Lies Kumara Dewi et al., 2024) yang lebih menekankan pada pendekatan persuasif terhadap Ormas non-terdaftar, penelitian ini fokus pada Ormas yang telah sah secara hukum namun rentan dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Elviora & Prathama, 2025) yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan stigma negatif terhadap Ormas. Dalam konteks DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas sosial dan dinamika politik yang tinggi, keterbatasan tersebut juga ditemukan dan menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas pengawasan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bakesbangpol masih lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif daripada penindakan langsung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wibowo & Harefa, 2015) yang menekankan pentingnya sistem pengawasan yang terstruktur berbasis regulasi. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang sudah ada belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam memberikan sanksi yang bersifat tegas.

Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa peran pengawasan terhadap Ormas tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan legalitas, tetapi juga perlu merambah pada aspek etika politik dan penguatan kapasitas organisasi untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik lokal. Pendekatan teoritis menggunakan teori peran (Biddle & Thomas) dengan lima indikator (harapan, norma, perilaku, penilaian, sanksi) memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan dinamis, tergantung pada konteks politik serta kesiapan kelembagaan daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) pada pelaksanaan Pilkada secara cukup efektif. Pelaksanaan peran tersebut dianalisis melalui lima indikator teori peran, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.

Pada indikator harapan, Bakesbangpol menaruh ekspektasi tinggi terhadap netralitas Ormas dalam dinamika politik lokal. Harapan ini kemudian dijabarkan melalui norma-norma hukum yang menjadi dasar pengawasan. Dalam praktiknya, Bakesbangpol juga menunjukkan wujud perilaku yang proaktif melalui pembinaan, klarifikasi lapangan, serta koordinasi lintas

sektor. Penilaian terhadap ketaatan Ormas dilakukan secara administratif dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Sementara itu, sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga rekomendasi kepada penegak hukum.

Secara umum, pengawasan yang dilakukan Bakesbangpol telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan kewenangan, anggaran, dan partisipasi Ormas yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan terhadap Ormas dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup wilayah dan jumlah informan. Fokus penelitian hanya pada satu wilayah administratif, yakni Provinsi DKI Jakarta, tanpa pembandingan dari daerah lain. Selain itu, keterbatasan waktu, biaya, dan akses terhadap Ormas yang tidak terdaftar juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penelitian berikutnya dilakukan dengan cakupan yang lebih luas secara geografis, serta melibatkan pendekatan kuantitatif dan integrasi sistem informasi digital. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pola pengawasan Ormas dan efektivitasnya dalam berbagai konteks politik lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada para informan yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bentuk dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dapat menjadi amal kebajikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyanaesa, P. B., & Utama, W. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1), 23–27.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Buhungo, R., Rahim, E., & Tome, A. H. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248>
- Elviora, M., & Prathama, A. (2025). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam. 5, 366–374.
- Hamayotsu, K. (2013). The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 658–677. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.780471>
- Ikhsan, M. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Dikemas (Pengabdian*

- Kepada Masyarakat*), 7(1), 23–27.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). *Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir*. 7(September).
- Irfan Uluputty. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 37–57.
- Lami, P. D. P. (2023). Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Ngada. *Ipdn*, 8(75), 147–154.
- Lies Kumara Dewi, Henni Kusumastuti, & Waskita, B. (2024). Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(1), 97–106. <https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.159>
- Lublin, D., & Wright, M. (2013). Engineering inclusion: Assessing the effects of pro-minority representation policies. *Electoral Studies*, 32(4), 746–755. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.06.001>
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher 's Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*.
- Nora, E., Susanti, D., Haskar, E., & Chofa, F. (2023). Implementasi Pengawasan Organisasi Politik Kota Bukittinggi. *Otentik LAW*, 1(2), 162–175.
- Pamungkas, P. C., Atthahara, H., & Resmana, S. (2024). UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENGUATAN KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA BEKASI. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6783–6790.
- Rowa, H., & Aser, F. (2019). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.338>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Saputra, A. M., & Mesra, R. (2024). Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)*, 1(1), 65–77.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Supartinah. (2023). Transformasi Komunikasi Politik: Analisis Partai Politik Baru dalam Era Digital. *Jurnal Sosial Politik ESOLUSI*, 6(2), 148–162. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.5989>
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 07(01), 01–19. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19>
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). Role theory: Concepts and research.